



2022

PERUBAHAN

RENCANA KERJA



(0265) 2641015



[bkpsdm.pgdrn](https://www.facebook.com/bkpsdm.pgdrn)



[bkpsdm.pangandaran](https://www.instagram.com/bkpsdm.pangandaran)

BKPSDM KABUPATEN PANGANDARAN

Jl. Raya Cigugur - Parigi No. 713 Kabupaten Pangandaran
Telp. 0265.2641015 / Fax 02641015

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang mana telah memberikan keberkahan dan kekuatan sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mengalami perubahan pada beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah di review dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Triwulan I dan II.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022 di Triwulan III dan IV.

Parigi, Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. DANI HAMDANI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650417 199003 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan..... 8

 1.4 Sistematika Penulisan 9

 1.4.1 Pokok Bahasan..... 9

 1.4.2 Isi Dokumen..... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA s/d TRIWULAN II tahun 2022 10

 2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 10

 2.2 Permasalahan Yang Ada Pada BKPSDM 16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM..... 17

 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan BKPSDM tahun 2022 18

BAB IV PENUTUP 25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan II 8

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 14

**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Triwulan I dan II Tahun 2022, yang mana memuat tentang seluruh perubahan perencanaan dalam beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja sangat dibutuhkan untuk mengefektifkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia periode Triwulan III dan IV yang mencerminkan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 memperhatikan dan mengacu kepada:

- 1) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;
- 2) Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

- 3) Rencana dan Strategi SKPD;
- 4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- 5) Solusi dari Permasalahan yang dihadapi;

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Peraturan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun

- 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);
 49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
 50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 52);
 51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 63).

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Adapun maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah dihasilkannya dokumen perencanaan tahunan yang menjamin adanya sinergitas antara pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, arah kebijakan, serta perumusan strategi sesuai dengan kebutuhan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada periode Triwulan III dan IV tahun 2022 yang secara optimal dituangkan dalam DPA Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

1. Untuk menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Triwulan III dan IV Tahun 2022;
2. Untuk mengintegrasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS Perubahan) tahun 2022;
3. Untuk mewujudkan sinergitas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dana.

Yang menjadi dasar pertimbangan diadakannya Perubahan Rencana Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah untuk menjaga efektifitas dan efisiensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta untuk mengoptimalkan anggaran, maka dari itu diperlukan beberapa perubahan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun dan direncanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahap awal.

1.4 Sistematika Penulisan

1.4.1 Pokok Bahasan

Secara garis besar pokok bahasan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah didasarkan pada urusan wajib yang dilakukan melalui :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- 2) Program Kepegawaian Daerah;
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

1.4.2 Isi Dokumen

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab I menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan serta Sistematika Penulisan.

2) Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2022.

Memuat kajian (*review*) hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, serta permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Program dan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan.

3) Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rincian tentang rencana perubahan dari beberapa Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang mengalami perubahan di Tahun 2022.

4) Bab IV Penutup

Memuat uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Anggaran RKPD murni Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 12.611.215.748.87 yang terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022 sebesar Rp. 10.857.306.644,00 dengan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 5.763.028.749,00 atau 53.08 %. Gambaran lengkap dari pencapaian kinerja dan belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Triwulan I dan II Tahun 2022 tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini :

KINERJA S/D TRIWULAN II
BKPSDM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Juni				Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan			
Kode Rekening	Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Anggaran		Realisasi		Indikator	Rencana	Realisasi	Satuan
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Rp. 10.857.306.644,00	Rp. 5.763.028.749,00	53,08	43,42%				
5.03	Usuran Kepegawaian	BKPSDM	Rp. 7.617.436.644,00	Rp. 4.663.949.949,00	61,23	86,84%				
5.03.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	BKPSDM	Rp. 4.725.267.144,00	Rp. 2.668.668.559,00	56,48	105,26%	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	95,00	100,00	%
						105,26%	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	95,00	100,00	%
						105,26%	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	95,00	100,00	%
						105,26%	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	95,00	100,00	%
5.03.01.2.01	I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	Rp. 109.088.000,00	Rp. 37.455.300,00	34,33	105,26%	Cakupan persentase perencanaan kinerja, dokumen penganggaran kinerja, dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95,00	100,00	%
5.03.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	Rp. 34.998.000,00	Rp. 16.776.100,00	47,93	66,67%	Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	4	Dokumen
	OutCome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
5.03.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SEKRETARIAT	Rp. 71.600.000,00	Rp. 20.071.000,00	28,03	33,33%	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12	4	Laporan
	OutCome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan									
5.03.01.2.01.07	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	Rp. 2.500.000,00	Rp. 608.200,00	24,33	60,00	Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	3	Laporan
	OutCome : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.03.01.2.02	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	Rp. 3.606.243.429,00	Rp. 1.877.551.803,00	52,06	105,26%	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	95,00	100,00	%
5.03.01.2.02.01	4. Penyaliran Gaji dan Tunjangan ASN	SEKRETARIAT	Rp. 3.571.314.429,00	Rp. 1.863.779.803,00	52,19	83,33%	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 12	25 4	Orang Bulan
	OutCome : Tersedianya Gaji Tunjangan ASN									
5.03.01.2.02.03	5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SEKRETARIAT	Rp. 31.929.000,00	Rp. 13.697.000,00	42,90	50,00%	Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	1	Dokumen
	OutCome : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
5.03.01.2.02.05	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SEKRETARIAT	Rp. 3.000.000,00	Rp. 75.000,00	2,50	100,00	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan
	OutCome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
5.03.01.2.02.07	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SEKRETARIAT	-	Rp. -	0,00	30,77	Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	4	Laporan
	OutCome : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan									

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

5.03.01.2.07	VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT	Rp 141.166.011,00	Rp 101.406.350,00	71,83	100,00%	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100,00	100,00	%
5.03.01.2.07.01	18 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SEKRETARIAT	Rp -	Rp -	0,00	0,00	Output :	0	0	Unit
	OutCome : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
5.03.01.2.07.02	19 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SEKRETARIAT	Rp -	Rp -	0,00	0,00	Output :	0	0	Unit
	OutCome : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
5.03.01.2.07.05	20 Pengadaan Mebel	SEKRETARIAT	Rp 23.985.778,00	Rp -	0,00	0,00	Output :	10	0	Unit
	OutCome : Tersedianya Mebel						Jumlah Unit Mebel yang Disediakan			
5.03.01.2.07.06	21 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEKRETARIAT	Rp 37.180.233,00	Rp 21.406.350,00	57,57	0,00	Output :	2	0	Unit
	OutCome : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
5.03.01.2.07.09	22 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SEKRETARIAT	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	100,00	100,00%	Output :	1	1	Unit
	OutCome : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yeg Disediakan			
5.03.01.2.08	VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT	Rp 185.376.864,00	Rp 100.688.767,00	54,32	104,80%	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95,00	99,56	%
5.03.01.2.08.01	23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SEKRETARIAT	Rp 5.000.000,00	Rp 2.566.000,00	51,32	0,00%	Output :	1	0	Laporan
	OutCome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat			
5.03.01.2.06.02	24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SEKRETARIAT	Rp 77.998.864,00	Rp 38.897.126,00	49,87	33,33% 100,00%	Output :	12 2	4 2	Laporan Rekening
	OutCome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan			
5.03.01.2.06.04	25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SEKRETARIAT	Rp 102.378.000,00	Rp 59.225.641,00	57,85	33,33%	Output :	12	4	Bulan
	OutCome : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
5.03.01.2.09	VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT	Rp 136.089.992,00	Rp 94.189.433,00	69,21	105,26%	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	95,00	100,00	%
5.03.01.2.09.18	26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SEKRETARIAT	Rp 125.090.992,00	Rp 90.226.433,00	72,13	100,00% 100,00%	Output :	3 3	3 3	Unit Kend Roda 2 Unit Kend Roda 4
	OutCome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
5.03.01.2.09.19	27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEKRETARIAT	Rp 6.000.000,00	Rp 3.130.000,00	52,17	0,00%	Output :	20	0	Unit
	OutCome : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
5.03.01.2.09.20	28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SEKRETARIAT	Rp 4.999.000,00	Rp 833.000,00	16,66	100,00%	Output :	1	1	Unit
	OutCome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi			
5.03.01.2.03	III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	Rp 24.600.000,00	Rp 10.908.000,00	44,34	100,00% 100,00%	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	43 329	43 329	Jenis Unit/Buah
5.03.01.2.03.05	8 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SEKRETARIAT	Rp 2.000.000,00	Rp 108.000,00	5,40	30,77	Output :	13	4	Laporan
	OutCome : Terlaksananya Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
5.03.01.2.03.06	9 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SEKRETARIAT	Rp 22.600.000,00	Rp 10.800.000,00	47,79	33,33%	Output :	12	4	Laporan
	OutCome : Terlaksananya Pentausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD			
5.03.01.2.05	IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	Rp 232.400.000,00	Rp 220.638.195,00	94,94	105,26%	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	95,00	100,00	%
5.03.01.2.05.04	10 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	SEKRETARIAT	Rp 17.400.000,00	Rp 9.000.000,00	51,72	0,00%	Output :	1	0	Dokumen
	OutCome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
5.03.01.2.05.09	11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SEKRETARIAT	Rp 215.000.000,00	Rp 211.638.195,00	98,44	100,00%	Output :	40	40	orang
	OutCome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
5.03.01.2.06	V. Administrasi Umum Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	Rp 290.292.848,00	Rp 225.830.711,00	77,79	105,26%	Persentase umum perangkat daerah	95,00	100,00	%
5.03.01.2.06.01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SEKRETARIAT	Rp 8.995.418,00	Rp 2.575.000,00	28,63	66,67% 100,00%	Output :	15 1	10 1	Jenis Paket
	OutCome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
5.03.01.2.06.02	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEKRETARIAT	Rp 76.618.683,00	Rp 76.109.514,00	99,34	0,00%	Output :	1	0	Paket
	OutCome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
5.03.01.2.06.03	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEKRETARIAT	Rp 8.998.906,00	Rp 3.717.587,00	41,31	100,00%	Output :	1	1	Paket
	OutCome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
5.03.01.2.06.05	15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SEKRETARIAT	Rp 34.999.841,00	Rp 23.683.000,00	67,67	100,00%	Output :	1	1	Paket
	OutCome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
5.03.01.2.06.06	16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SEKRETARIAT	Rp 20.700.000,00	Rp 10.350.000,00	50,00	100,00%	Output :	17	17	Dokumen
	OutCome : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
5.03.01.2.06.09	17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SEKRETARIAT	Rp 139.980.000,00	Rp 109.395.610,00	78,15	33,33%	Output :	12	4	Laporan
	OutCome : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Rp 2.892.169.500,00	Rp 1.995.281.390,00	68,99	100,00%	Persentase Cakupan Layanan Kepegawaian Daerah	100	100,00	%
5.03.02.2.01	IX. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	P2KI	Rp 666.546.000,00	Rp 600.327.196,00	90,07		Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	300	1085	Orang
5.03.02.2.01.21	29 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK OutCome : Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	P2KI	Rp 611.610.000,00	Rp 579.796.196,00	94,80	0,00%	Output : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1	0	Dokumen
5.03.02.2.01.22	30 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian OutCome : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	P2KI	Rp 11.276.000,00	Rp 3.213.000,00	28,49	0,00%	Output : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	220	0	Dokumen
5.03.02.2.01.23	31 Fasilitas Lembaga Profesi ASN OutCome : Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	P2KI	Rp 4.720.000,00	Rp -	0,00	0,00%	Output : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	0	Lembaga
5.03.02.2.01.24	32 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian OutCome : Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	P2KI	Rp 38.940.000,00	Rp 17.318.000,00	44,47	0,00%	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	0	Dokumen
5.03.02.2.02	X. Mutasi dan Promosi ASN	MPP	Rp 733.813.500,00	Rp 561.584.453,00	76,53	266,00% 150,00%	Jumlah Pejabat yang Terlantik Jumlah PNS Non Struktural yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang ditetapkan	200 200 0	532 300 0	Orang Orang Orang
5.03.02.2.02.01	25 Pengelolaan Mutasi ASN OutCome : Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi	MPP	Rp -	Rp -	0,00	19,00%	Output : Jumlah PNS Non Struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi	200	38	Orang
5.03.02.2.02.02	26 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN OutCome : Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	MPP	Rp 264.240.000,00	Rp 230.071.900,00	87,07	49,40% 0,00%	Output : Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan Jumlah Aparatur yang lulus dalam ujian dinas	500 30	247 0	SK Orang
5.03.02.2.02.03	27 Pengelolaan Promosi ASN OutCome : Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	MPP	Rp 469.573.500,00	Rp 331.512.553,00	70,60	0,00%	Output : Jumlah dokumen pengembangan karir dan promosi ASN	1	0	Dokumen
5.03.02.2.03	XI. Pengembangan Kompetensi ASN	P2KI	Rp 988.563.000,00	Rp 379.919.900,00	38,43	101,37%	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	73	74	Orang
5.03.02.2.03.04	28 Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN OutCome : Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	P2KI	Rp 707.091.000,00	Rp 154.264.800,00	21,82	0,00%	Output : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	8	0	Orang
5.03.02.2.03.01	29 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat OutCome : Meningkatnya kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	P2KI	Rp 281.472.000,00	Rp 225.655.100,00	80,17	0,00%	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	0	Dokumen
5.03.02.2.03	XII. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	MPP	Rp 503.247.000,00	Rp 453.449.841,00	90,10	97,75%	Jumlah ASN yang memperoleh penilaian kinerja ≥ 80	622	608	Orang
5.03.02.2.03.02	30 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur OutCome : Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	MPP	Rp 258.683.000,00	Rp 223.787.091,00	86,51	0,00%	Output : Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	1	0	Dokumen
5.03.02.2.03.07	31 Pembinaan Disiplin ASN OutCome : Meningkatkan Disiplin ASN	MPP	Rp 221.064.000,00	Rp 220.012.750,00	99,52	50,00%	Output : Jumlah laporan pegawai yang melaksanakan ketentuan jam kerja	12	6	Laporan
5.03.02.2.03.08	32 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN OutCome : Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	MPP	Rp 23.500.000,00	Rp 9.650.000,00	41,06	0,00%	Output : Jumlah SK penjatihan hukuman disiplin	8	0	SK
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	P2KI	Rp 3.239.870.000,00	Rp 1.099.078.800,00	33,92	0,00%	Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional kepemimpinan, manajerial dan prajabatan	100,00	0,00	%
5.04.02.2.02	XIII. Sertifikasi, Kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	P2KI	Rp 3.239.870.000,00	Rp 1.099.078.800,00	33,92	0,00%	Jumlah ASN yang lulus dalam pengembangan kompetensi Manajerial dan prajabatan	655	0	Orang
5.04.02.2.02.07	33 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan OutCome : Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	P2KI	Rp 3.239.870.000,00	Rp 1.099.078.800,00	33,92	0,00%	Output : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	3	0	Laporan

Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja s/d Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa Sub Kegiatan yang pelaksanaannya belum maksimal, dalam artian masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan realisasi belanja sebesar 47,93% dan realisasi kinerja sebesar 66,67% hal ini disebabkan masih terdapat 2 dokumen yang belum disusun;
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi belanjanya 28,03% dan realisasi kinerja sebesar 33,33%. Hal ini disebabkan pembuatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dilaksanakan setelah selesai anggaran semester I atau tiap semester;
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah, realisasi belanjanya 24,33% dan realisasi kinerja sebesar 60%. Hal ini disebabkan pelaksanaannya kegiatan evaluasi kinerja setelah semester I berakhir;
4. Penyajian gaji dan tunjangan ASN, realisasi belanjanya sebesar 52,19% dan

realisasi kinerja sebesar 83,33%. Hal ini disebabkan pelaksanaannya masih berjalan sampai dengan akhir tahun.

5. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, realisasi belanjanya sebesar 42,90% dan realisasi kinerjanya sebesar 50%, hal ini disebabkan terdapat 1 dokumen yang disusun di akhir tahun;
6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, realisasi belanjanya 2,50% dan realisasi kinerjanya sebesar 100%.
7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD realisasi kinerjanya sebesar 30,77% hal ini disebabkan masih terdapat laporan yang disusun di akhir tahun.
8. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah realisasi belanjanya 5,4% dan realisasi kinerjanya sebesar 30,77% hal ini disebabkan penyusunan laporan barang milik daerah dilaksanakan pada awal semester II dan akhir tahun;
9. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD realisasi anggaranya sebesar 47,79% dan realisasi kinerjanya sebesar 33,33% hal ini disebabkan masih terdapat kegiatan penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan di semester II;
10. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian realisasi anggarannya sebesar 51,72% dan realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan penyusunan dokumen di akhir tahun;
11. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi realisasi anggarannya sebesar 98,44% dan realisasi kinerjanya 100%;
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, capaian penyerapannya 28.63%. Hal ini disebabkan komponen listrik/penerangannya masih bisa digunakan/layak untuk itu penyediaan tidak dibelanjakan sepenuhnya;
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor realisasi anggarannya sebesar 99,34% dan realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan masih terdapat penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum terealisasi;
14. Penyediaan peralatan rumah tangga realisasi anggaranya sebesar 41,31% dan realisasi kinerjanya sebesar 100%;
15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi anggarannya sebesar 67,67% dan realisasi kinerjanya sebesar 100%;
16. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan realisasi anggarannya sebesar 50% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Namun masih terdapat anggaran yang perlu dibayarkan di semester berikutnya;

17. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi anggarannya sebesar 78,15% dan realisasi kinerja sebesar 33,33%. Masih terdapat laporan yang belum disusun;
18. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tidak dianggarkan dan dilaksanakan kegiatannya;
19. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan tidak dianggarkan dan dilaksanakan kegiatannya;
20. Pengadaan mebel, realisasi belanjanya 0%. Hal ini disebabkan mebel masih bisa digunakan/layak dipakai;
21. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya realisasi anggarannya sebesar 57,57% dan realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan belum terdapat kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya di semester I;
22. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya realisasi anggarannya sebesar 100% dan realisasi kinerjanya sebesar 100%;
23. Penyediaan jasa surat dan menyurat realisasi anggarannya sebesar 51,32% dan realisasi kinerjanya 0% hal ini disebabkan laporan kinerja disusun di akhir tahun;
24. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi anggarannya sebesar 49,87% dan realisasi kinerjanya 33,33% hal ini disebabkan masih terdapat laporan yang disusun di semester II;
25. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor realisasi anggarannya sebesar 57,85% dan realisasi kinerjanya sebesar 33,33%, hal ini disebabkan masih terdapat kegiatan yang akan dilaksanakan di semester II;
26. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan realisasi anggarannya sebesar 100%;
27. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi anggarannya sebesar 52,17% dan realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan di semester II;
28. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, realisasi belanjanya 16,66%. Hal ini disebabkan karena perlengkapan masih layak pakai belum mengalami kerusakan yang berat;
29. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK realisasi anggarannya sebesar 98,40% dan realisasi kinerjanya sebesar 0%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
30. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian, realisasi belanjanya 28,49% dan realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;

31. Fasilitas lembaga profesi ASN, realisasi belanjanya 0% dan realisasi kinerjanya 0% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
32. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian, realisasi belanjanya sebesar 44,47% dan realisasi kinerjanya sebesar 0%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
33. Pengelolaan Mutasi ASN, realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
34. Pengelolaan kenaikan pangkat, realisasi anggarannya sebesar 87,07% dan realisasi kinerjanya sebesar 49,04% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
35. Pengelolaan promosi ASN, realisasi anggarannya sebesar 70,06% dan realisasi kinerjanya sebesar 0%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
36. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, realisasi belanjanya 21,82% dan realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
37. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat, realisasi belanjanya 80,17% dan realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
38. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur realisasi anggarannya sebesar 86,51% dan realisasi kinerjanya sebesar 0%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
39. Pembinaan disiplin ASN, realisasi anggarannya sebesar 99,52% dan realisasi kinerjanya sebesar 50% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
40. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, realisasi anggarannya sebesar 41,06% dan realisasi kinerjanya sebesar 0% hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan;
41. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, realisasi belanjanya 33,92%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan, sehingga penggunaan anggarannya belum terealisasi secara maksimal.

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada BKPSDM

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui program, kegiatan maupun sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dan II Tahun 2022, dalam menjalankan kegiatannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan masih perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran disebabkan *refocusing* anggaran.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur dari segi peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan sarana peralatan kantor yang menunjang kelancaran bekerja yang harus ditingkatkan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Adapun Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 berisi tentang program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran visi dan misi pembangunan jangka menengah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah **Program Tahunan** yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Pangandaran ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, dengan Perubahan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 merupakan pedoman program kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran tahun 2022. Dokumen Perubahan Rencana Kerja disusun ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) yang lebih detail dalam Program Prioritas dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022, kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan DPAP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

Namun dalam pelaksanaannya tidak semua program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rancangan awal, hal ini disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga dengan adanya penurunan pendapatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyebabkan berkurangnya anggaran di seluruh SKPD.

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada perubahan RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022	
										Semula	Menjadi
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	03				KEPEGAWAIAN						
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5 Dokumen
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Kegiatan	12 Laporan
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4 Laporan
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang	12 Bulan 30 Orang
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Kegiatan	2 Laporan
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun				12 Laporan	12 Laporan
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	13 Laporan
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				43 Jenis	12 Laporan
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan				1 Kegiatan 12 Laporan	1 Kegiatan 12 Laporan
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi				30 Orang	30 Orang

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5	03	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
5	03	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan				15 Jenis 141 Unit/buah	15 Jenis 141 Unit/buah
5	03	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1855 Unit/buah 67 Jenis	1855 Unit/buah 67 Jenis
5	03	01	2.05	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				2 Jenis 329 Unit/buah	2 Jenis 329 Unit/buah
5	03	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				3 Jenis 22807 Unit/buah	3 Jenis 22807 Unit/buah
5	03	01	2.05	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan				17 Jenis 204 Eksemplar	17 Jenis 204 Eksemplar
5	03	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Kegiatan	1 Laporan
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan				1 Unit Kend Roda 4	1 Unit Kend Roda 4
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah mebel yang diadakan				3 Jenis 3 unit/Buah	3 Jenis 3 unit/Buah
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				2 Jenis 5 Unit/buah	2 Jenis 5 Unit/buah
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				2 Gedung kantor	2 Gedung kantor
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan				416 Buah Materai	416 Buah Materai
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				2 Rekening 12 Bulan	2 Rekening 12 Bulan
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Laporan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan				3 Unit Kend. Roda 2 3 Unit Kend. Roda 4	3 Unit Kend. Roda 2 3 Unit Kend. Roda 4
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola				329 Unit/buah	329 Unit/buah
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi				2 Unit	2 Unit
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				350 Orang	2 Dokumen
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				245 SK	220 Dokumen
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				500 Kartu	1 Lembaga
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Sistem	1 Dokumen
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS Non struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi				200 Orang	200 Orang
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 SK	1 Dokumen
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	2 Dokumen
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN						
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				12 Orang	7 Orang
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				40 Orang	1 Dokumen

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	35 Dokumen	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				12 Laporan	100 Orang	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				2 Dokumen	5 Laporan	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				32 Orang	3 Laporan	
TOTAL												

Tabel 3.1 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2022

Rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 terdiri dari 3 Program dan 13 Kegiatan 41 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan Tersebut dilaksanakan oleh 3 Bidang yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Bidang Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Kompetensi Informasi, Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Aparatur.



Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengefektifkan Program dan Kegiatan serta mengoptimalkan anggaran yang ada, sehingga perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud dengan baik.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah **Program Tahunan** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan III dan IV Tahun anggaran 2022, yang diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. DANI HAMDANI, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650417 199003 1 013